

AKSES  TERBUKA **ARTIKEL**

Diterima

07 Oktober 2023

Disetujui

07 Desember 2023

Ditebitkan

Desember 2023

DOI

**Strategi Pembangunan Ekonomi Melalui Pertambangan Timah Di Pulau Singkep Dilihat Dari Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

*(Economic Development Strategy Through Tin Mining on Singkep Island As Seen from The Concept Of Sustainable Development Goals (SDGs))*

**M. Ferdi Septianda**

Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Indonesia.

✉ [2105010054@student.umrah.ac.id](mailto:2105010054@student.umrah.ac.id)

**Abstrak:** Tantangan ekologis menjadi permasalahan utama dalam penambangan timah di Pulau Singkep, maka dalam pengelolaannya diperlukan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini bertujuan untuk mencari bagaimana strategi pembangunan ekonomi melalui timah di Pulau Singkep dilihat dari konsep SDGs. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat studi kepustakaan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber data yang digunakan berasal dari Buku-buku, artikel ilmiah, dan berita online. Penelitian ini menghasilkan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui timah agar tetap berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Pertama, melalui perwujudan SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan), pemerintah dapat mengelola sebagian pendapatan hasil tambang kedalam investasi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kedua, melalui perwujudan SDGs 9 (Industri, Inovasi, Dan Infrastruktur), dapat dilakukan dengan memperbaiki pelabuhan dan jalan untuk mendukung logistik, mengembangkan teknologi penambangan dan mengembangkan klaster industri. Ketiga, melalui perwujudan SDGs 12 (Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab), dapat dilakukan dengan cara penggunaan peralatan otomatis, kendali energi dan manajemen data yang cerdas, diversifikasi produk, serta teknologi pengelolaan limbah. Keempat, melalui perwujudan SDGs 15 (Kehidupan Di Darat) dapat dilakukan melalui pengawasan ketat dan rencana lingkungan sebagai upaya mitigasi permasalahan lingkungan. Kelima, melalui perwujudan SDGs 17 (Kemitraan Untuk Tujuan), dapat dilakukan dengan membentuk kemitraan yang kuat antara pemerintah dengan swasta, kemitraan internasional, serta kemitraan dengan masyarakat lokal. Melalui strategi-strategi ini, pemerintah dapat mengelola tambang timah di Pulau

Singkep dengan lebih berkelanjutan, menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar untuk masyarakat setempat, dan memastikan perlindungan lingkungan yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Strategi, Pembangunan ekonomi, pertambangan, SDGs

**Abstract:** *Ecological challenges are the main problem in tin mining on Singkep Island, so managing it requires the concept of sustainable development, namely the Sustainable Development Goals (SDGs). This research aims to find out how the economic development strategy through tin on Singkep Island is seen from the SDGs concept. This research is qualitative research in the form of a literature review to collect information relevant to the topic discussed. The data sources used come from books, scientific articles and online news. This research produces several strategic steps that can be taken by the government in economic development through tin so that it remains oriented towards sustainable development. First, through the release of SDGs1 (No poverty), the government can manage part of the mining revenue into investment in education, health and infrastructure. Second, through participation in SDGs9 (Industry, Innovation and Infrastructure), this can be done by improving ports and roads to support logistics, developing mining technology and developing cluster industries. Third, through SDGs12 (responsible consumption and production) tools, this can be done by using automatic equipment, intelligent energy control and data management, product diversification, and waste management technology. Fourth, changes to SDGs15 (life on land) can be carried out through strict monitoring and environmental planning as an environmental mitigation effort. Fifth, through SDGs17 exchanges (partnerships to achieve goals), this can be done by forming strong partnerships between government and the private sector, international partnerships, and partnerships with local communities. Through these strategies, the government can manage tin mining on Singkep Island more sustainably, generating greater economic benefits for local communities, and ensuring better environmental protection.*

**Keywords:** *Strategy, Economic development, mining, SDGs*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau dengan beragam sumber daya alam dan mineral pada tiap pulau. Sumber daya alam dan mineral yang ada menjadi komoditas ekspor dan melahirkan hubungan bilateral berkesinambungan antara Indonesia dengan negara lain. Hubungan bilateral dijalin guna memberi *impact* yang besar bagi negara dan masyarakat serta upaya untuk memenuhi fungsi-fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Fungsi-fungsi tersebut berorientasi pada kepentingan hidup masyarakat untuk memperoleh hak-hak sebagai warga negara dengan memberi ruang gerak pada masyarakat yang dituangkan dengan berbagai program kerja pada tiap sektor (Septianda, 2023). Berfokus pada fungsi pembangunan, pembangunan ditafsirkan sebagai pertumbuhan ekonomi sehingga hal ini menjadi indikator keberhasilan suatu negara dan untuk mencapainya harus dijalankan oleh pemerintah dan rakyat (Hasan & Muhammad, 2018). Optimalisasi fungsi pembangunan yang dijalankan secara konsisten dan komprehensif berbasis pada kesejahteraan masyarakat akan berdampak positif terhadap proses pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah usaha yang dilakukan untuk membenahi kualitas hidup masyarakat sehingga mampu menghadapi permasalahan seperti pengangguran, kesenjangan ekonomi, serta kemiskinan (Harahap, 2018). Pembangunan ekonomi memerlukan sinergi diantara pemangku kepentingan. Sinergi tersebut dibangun dengan komunikasi multi-arah yang merepresentasikan asas desentralisasi. Desentralisasi penting dalam meninjau hubungan serta proses yang berjalan dalam mencari format untuk mengelola pemerintahan yang sukses terkait relasi pusat dan daerah (Larasati, 2022). Pemerintah daerah menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, kecuali beberapa urusan

seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter serta fiskal nasional, dan agama (Suryanto, 2010). Asas desentralisasi memberi ruang gerak yang luas bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan mineral yang mereka miliki. Desentralisasi berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi pada suatu daerah yang memanfaatkan sumber daya alam dan mineral. Pengelolaan sumber daya mineral yang baik akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi (Robuwan & Wirazilmustaan, 2022).

Kepulauan Riau menjadi satu dari sekian Provinsi yang memiliki sumber daya alam dan mineral yang berlimpah. Kepulauan Riau memiliki potensi kelautan baik diatas laut, bawah laut, serta potensi kebaharian yang terdapat didaratannya yang harus disadari sebagai bonus geografi (Mukhlis & Setyadiharja, 2017). Secara umum, Kepulauan Riau mempunyai wilayah yang luasnya 251.801,71 km<sup>2</sup> terdiri dari lautan yang luasnya 241.215,3 Km<sup>2</sup> (96,79%) dan daratan yang hanya 10.595,41 km<sup>2</sup> (4,21%). Lautan yang lebih luas daripada daratan sebagai sebuah kondisi geografis menghasilkan dominannya potensi kelautan dan perikanan (Widiyarini & Latuconsina, 2022). Namun, tiap-tiap kabupaten di Kepulauan Riau tidak sepenuhnya bergantung pada sektor perikanan, potensi yang berbeda pada tiap kabupaten menghasilkan sektor alternatif untuk pembangunan ekonomi. Maka dari itu, pemerintah daerah diberi wewenang luas untuk mengurus dan mengatur pembangunan ekonomi daerah mengacu pada potensi daerah tersebut (Djadjuli, 2018). Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi besar pada sektor pertambangan timah yang terletak di Pulau Singkep, Kabupaten Lingga. Pulau Singkep eksis dikenal sebagai daerah penghasil timah terbesar pada masa jayanya tahun 1812-1992.

### **A. Sejarah dan tantangan pada pertambangan timah di Pulau Singkep**

Pulau Singkep merupakan sebuah pulau yang terletak di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Pada masa lampau, pulau Singkep pernah jaya melalui penambangan timah yang dikelola oleh kerajaan Belanda yang berafiliasi dengan pemerintah Indonesia. Kejayaan itu semakin meningkat saat pemerintah Indonesia mengambil alih kelola pertambangan pasca kemerdekaan. Pertambangan timah di Pulau Singkep melalui PT. Timah mulai menurun pada tahun 1990-an yang menyebabkan aktivitas penambangan harus terhenti, dikarenakan penurunan harga timah dunia yang semula 16.000 Dolar AS menjadi 8.000 Dolar per metrik ton (Hadiprashada & Osira, 2022). Kendati aktivitas penambangan timah di Pulau Singkep telah dihentikan dan tidak ada aspek legalitas untuk membenarkan masyarakat setempat menambang timah, nyatanya masih banyak penambangan timah ilegal di beberapa titik penambangan timah seperti Kampung Mentok, Batu Berdaun, Air Panas, Tanah Sejuk, Raya, Tanjung Jodoh, Kebun Sirih dan Air Hitam.

Maraknya penambangan timah ilegal di Pulau Singkep ini disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat, minim lapangan pekerjaan, ketersediaan timah yang masih memadai untuk digali, aksesibilitas yang mudah untuk menjajakan timah, serta harga timah yang tinggi. Aktivitas penambangan timah memang menguntungkan secara ekonomi, dari segi lain penambangan timah juga meninggalkan permasalahan pada lingkungan (Baskoro, 2021). Penambangan timah ilegal berdampak buruk bagi lingkungan, perlu waktu yang lama untuk merevitalisasi lingkungan yang terdampak. Hal ini disebabkan aktivitas penambangan yang tidak ramah lingkungan serta tidak ada manajemen pemilihan lokasi untuk menyesuaikan kondisi tanah. Sukar untuk mengkomparasi antara faktor Ekonomi dan faktor ekologi lingkungan,

kebutuhan akan timah sangat tinggi sedangkan ketersediaan timah tidak bisa mengandalkan satu titik. Hal itu yang menyebabkan banyak titik penambangan timah di Pulau Singkep. Masyarakat yang menambang tidak sepenuhnya bersalah, minimnya lapangan pekerjaan di Pulau Singkep membuat mereka terpaksa menambang dengan segala risiko. Sumber daya mineral berupa timah di Pulau Singkep sangat potensial dalam hal pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan hasil alam membutuhkan konsep pembangunan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan ekologis agar dan dapat dinikmati generasi kedepannya, konsep tersebut ialah Sustainable Development Goals (SDGs).

### **B. Konsep SDGs**

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program internasional yang berjangka panjang untuk memaksimalkan segala potensi dan segala sumber daya yang ada pada tiap negara (Irhamasyah, 2019). SDGs digagas oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan telah disepakati oleh tiap negara yang tergolong anggota PBB. Singkatnya, SDGs dibicarakan pertama kali dalam United Nations Conference on Sustainable Development bertempat di Rio de Janeiro tahun 2012 dan diresmikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan berkelanjutan PBB yang dilangsungkan pada tanggal 25-27 September 2015 di New York (Wahyuningsih, 2018). Pada periode 2000-2015 diterapkan Millennium Development Goals (MDGs) yang harus diakui kemajuannya, namun ada beberapa indikator bidang kesehatan yang tidak tercapai, maka SDGs digagas pada periode 2015-2030 untuk menyelesaikan permasalahan yang belum usai pada periode MDGs (Trimulato et al., 2021). SDGs hadir untuk mengentaskan kemiskinan serta kelaparan, membasmi ketimpangan, menjamin perlindungan alam dan sumber daya yang ada didalamnya, serta mewujudkan keadaan yang berkelanjutan dan adil

dalam pertumbuhan ekonomi (Handrian, E., & Andry, 2020).

Konsep SDGs mempunyai tujuh belas poin atau agenda, diantaranya: (1) Tidak Ada Kemiskinan; (2) Tidak Ada Kelaparan; (3) Kesehatan dan Kesejahteraan; (4) Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, setara, dan inklusif untuk semua; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi; (7) Energi Terjangkau dan Bersih; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, Membangun infrastruktur yang tahan lama, mendorong inovasi, dan memajukan industri; (10) Pengurangan Ketidaksetaraan; (11) Kota dan Komunitas; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Mengelola konsumsi dan produksi sumber daya alam dengan berkelanjutan; (13) Aksi Perubahan Iklim; (14) Kehidupan di Bawah Air; (15) Kehidupan di Darat, Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pengelolaan ekosistem darat yang berkelanjutan; (16) Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat; (17) Kemitraan untuk Tujuan, Mendorong kerjasama global untuk mencapai semua tujuan SDGs (Muslim et al., 2021).

Agenda-agenda dalam konsep SDGs menjadi rujukan untuk menciptakan kesejahteraan tiap daerah. Potensi sumber daya mineral berupa timah di Pulau Singkep harus dimaksimalkan dalam pembangunan ekonomi dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan agar kebermanfaatannya dapat dirasakan generasi mendatang. Banyak Tantangan yang dihadapi, mulai dari keabsahan aktivitas penambangan sampai isu-isu lingkungan. Dilihat dari sisi ekonomi, penambangan timah mampu mengatasi problema ekonomi di pulau singkep. sebaliknya, dilihat dari sisi lingkungan tentu penambangan timah ini dianggap kegiatan yang merusak. Aktivitas penambangan timah ilegal sulit dihentikan, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Lingga mengupayakan izin penambangan timah di Pulau Singkep. ini dilakukan agar pemerintah dapat

berperan secara penuh dengan menggandeng masyarakat Pulau Singkep, Swasta, dan negara luar sehingga kebermanfaatan timah dapat dirasakan masyarakat luas. Perlu strategi dalam optimalisasi penambangan timah untuk pembangunan ekonomi yang tetap beraspek pembangunan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menemukan jawaban dari “Bagaimana Strategi Pembangunan ekonomi melalui tambang timah Pulau singkep dilihat dari Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)”. Penelitian ini akan menggunakan lima agenda yang relevan dari tujuh belas agenda SDGs. Lima agenda tersebut adalah (1) Tidak Ada Kemiskinan, (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, (15) Kehidupan di Darat, dan (17) Kemitraan untuk Tujuan. Lima agenda SDGs ini akan dijadikan acuan untuk menemukan strategi pembangunan ekonomi melalui pertambangan timah di Pulau singkep.

## II. METODE

Penelitian memerlukan metode untuk mendapati hasil yang komprehensif dan konkret. penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (Library research). Studi kepustakaan adalah usaha untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas. Sumber data yang digunakan pada penelitian kualitatif bersifat studi kepustakaan berasal dari buku rujukan serta artikel ilmiah (Tahmidaten & Krismanto, 2020). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berita online yang relevan sebagai sumber data agar hasil penelitian yang didapatkan maksimal. Adapun skenario atau prosedur yang dilakukan pada penelitian kualitatif bersifat studi kepustakaan meliputi: 1) Menelusuri sumber primer dan skunder, 2) klasifikasi berdasarkan formula penelitian. 3) pengolahan data atau pengutipan referensi, 4) menampilkan data, 5)

abstraksi data, 6) interpretasi data, 7) kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perwujudan Agenda (SDGs 1) tidak ada kemiskinan

Lapangan pekerjaan di Pulau Singkep belum memadai, sektor kelautan yang selama ini diandalkan oleh warga Pulau Singkep tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kian kompleks. Banyak warga yang bermigrasi ke luar daerah seperti Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan lain-lain. Bahkan tidak sedikit yang bekerja di Luar Negeri seperti Malaysia dan Singapura dengan tujuan memperbaiki keadaan ekonomi. Pemerintah Daerah Punya kewajiban untuk menjalankan roda perekonomian di Pulau Singkep. Timah berpotensi untuk mengurangi kemiskinan di Pulau Singkep dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah maupun nasional, tetapi juga memiliki risiko lingkungan dan sosial yang perlu dikelola dengan baik. Upaya untuk mengurangi kemiskinan harus diarahkan pada pengoptimalan manfaat dari tambang timah, baik secara ekonomi maupun sosial. Ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa pendapatan dari penambangan dikelola secara adil dan transparan, dengan sebagian hasil tambang digunakan untuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa penambangan timah mematuhi standar lingkungan yang ketat dan menjalankan praktik penambangan yang berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup pemantauan dampak lingkungan, restorasi lahan bekas tambang, dan perlindungan terhadap ekosistem lokal yang rentan. Memastikan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan adalah kunci dalam menjaga keberlanjutan jangka panjang dari sektor tambang timah. Sektor

tambang timah juga dapat memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat, tetapi perlu memastikan bahwa kondisi kerja aman, upah layak, dan perlindungan bagi pekerja terpenuhi. Dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari tambang timah diarahkan kepada masyarakat lokal secara adil, dan sektor ini dikelola dengan keberlanjutan, maka tentu timah efektif untuk mengurangi kemiskinan, lapangan pekerjaan bertambah, persentase warga yang bermigrasi ke luar daerah berkurang. Dengan langkah komprehensif, pembangunan ekonomi akan tercapai kendati memerlukan waktu yang tidak sebentar.

#### B. Perwujudan Agenda (SDGs 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Pembangunan ekonomi melalui timah di Pulau Singkep memerlukan penunjang agar aktivitas yang dilakukan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah dapat melakukan cara seperti Modernisasi Infrastruktur. Modernisasi infrastruktur merupakan langkah kunci untuk menunjang agar aktivitas yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien. Investasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung logistik dan transportasi yang efisien dalam proses penambangan timah, seperti perbaikan jalan akses, pelabuhan, dan penyediaan energi yang handal, akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasi. Selanjutnya, pemerintah daerah bisa melakukan inovasi dalam industri tambang timah dengan mendukung penelitian dan pengembangan teknologi penambangan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Mendukung dan menyediakan akses untuk merealisasikan inisiatif peningkatan teknologi seperti penggunaan otomatisasi, penggunaan sumber energi terbarukan, dan manajemen data yang cerdas.

Pemerintah daerah bisa melakukan pengembangan klaster industri sebagai wujud inovasi agar kegiatan yang dilakukan dengan cara



memfasilitasi pembentukan klaster industri untuk mengkolaborasikan antara perusahaan tambang, pemasok, dan lembaga pendidikan. kolaborasi yang dilakukan mampu menciptakan pertukaran pengetahuan dan meningkatkan efisiensi operasional. Di Kepulauan Riau terdapat perguruan tinggi negeri maupun swasta yang sangat memungkinkan untuk melakukan kerja sama mendukung pertukaran ilmu terkait penambangan timah di Pulau Singkep. manfaat yang diciptakan dari kolaborasi ini adalah untuk mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi, membuat regulasi dan kebijakan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memaksimalkan penambangan timah di Pulau Singkep.

### **C. Perwujudan agenda (SDGs12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab**

Pemerintah selaku agen pengawasan dari aktivitas penambangan timah di Pulau Singkep memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penambangan timah berorientasi pada konsep pembangunan berkelanjutan agar kebermanfaatan timah dapat dirasakan generasi mendatang. diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama-tama, peningkatan efisiensi dalam proses penambangan timah adalah kunci. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan teknologi modern dan praktik penambangan yang lebih efisien, termasuk penggunaan peralatan otomatisasi, kendali energi yang cermat, dan manajemen data yang cerdas. Selain itu, diversifikasi produk tambang timah menjadi produk yang lebih bernilai tambah dan ramah lingkungan akan memberikan manfaat jangka panjang. Pergeseran dari ekspor bijih mentah ke produk olahan seperti produk timah berkualitas tinggi, baterai, atau komponen elektronik yang mengandung timah akan meningkatkan daya saing dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.

Pengelolaan limbah tambang juga merupakan aspek penting. Penerapan praktik pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dan menciptakan potensi nilai tambahan dari limbah tersebut. Teknologi pemulihan sumber daya dari limbah tambang dapat digunakan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Selain itu, pemantauan dan pelaporan yang ketat terkait dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas penambangan timah serta transparansi dalam pelaporan akan membantu mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dan memastikan kepatuhan terhadap standar berkelanjutan.

### **D. Perwujudan agenda (SDGs15) Kehidupan di darat**

Penambangan timah akan menimbulkan dampak yang besar pada kehidupan di darat jika tidak memperhatikan aspek lingkungan. Dampak yang muncul seperti perubahan pembentukan alamiah lahan dan rusaknya habitat makhluk hidup, keanekaragaman hayati berkurang, polusi, lubang galian (Kolong) dapat menyebabkan munculnya penyakit malaria yang bersifat menular (Efrizal, 2020). Pemerintah daerah yang menjadi leading sector dalam aktivitas penambangan timah harus menyusun cara meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah daerah dapat merencanakan restorasi lingkungan yang komprehensif untuk memulihkan lahan bekas tambang, penggunaan teknologi modern yang mengurangi dampak lingkungan, dan pengawasan ketat oleh pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.

Restorasi lingkungan kerap diabaikan karena dianggap mengurangi pendapatan dari hasil timah, padahal jika tidak dilakukan akan muncul permasalahan yang besar. Rencana restorasi lingkungan merupakan elemen penting dalam strategi pembangunan ekonomi melalui tambang timah yang berfokus pada keberlanjutan dan kehidupan di darat. Rencana ini merujuk pada

serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk mengembalikan lahan bekas tambang timah ke kondisi semula atau mendekati kondisi semula. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan jangka panjang dari aktivitas pertambangan dan mendukung pemulihan ekosistem darat yang mungkin terganggu. rencana restorasi lingkungan harus mencakup pemahaman mendalam tentang kondisi awal lingkungan sebelum tambang timah beroperasi. Ini melibatkan survei dan pemetaan ekosistem, termasuk jenis tanaman, hewan, dan keanekaragaman hayati lainnya yang ada sebelumnya.

#### **E. Perwujudan agenda (SDGs17) Kemitraan untuk Tujuan**

Penambangan timah yang beraspek pada pembangunan berkelanjutan harus memiliki kemitraan yang kuat agar tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai sehingga kemiskinan di Pulau Singkep menurun. Kemitraan menjadi kebutuhan pemerintah dalam melaksanakan peranannya terutama dalam mengatasi kemiskinan dengan menggandeng berbagai aktor (Rasdi & Kurniawan, 2019). Pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal berkaitan dengan kemitraan agar tujuan dapat tercapai, diantaranya:

- a. Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta  
Kemitraan yang erat antara pemerintah Pulau Singkep dan perusahaan tambang timah swasta adalah pondasi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu berperan sebagai pengatur yang efisien, memastikan bahwa kontrak kerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut mencakup ketentuan-ketentuan yang adil, seperti pembagian pendapatan dan pajak yang wajar. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci, dengan pemantauan ketat terhadap aktivitas perusahaan tambang dan pemenuhan kewajiban mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.

- b. Kemitraan Internasional

Kemitraan internasional yang solid dapat membantu Pulau Singkep mengatasi kendala teknologi, sumber daya finansial, dan pengetahuan yang mungkin terbatas. Kolaborasi dengan organisasi internasional, negara-negara mitra, atau lembaga donor dapat memberikan akses ke sumber daya tambahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini bisa mencakup bantuan dalam meningkatkan praktik pertambangan, transfer teknologi hijau, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

- c. Kemitraan dengan Masyarakat Lokal

Kemitraan dengan masyarakat lokal harus menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi tambang timah di Pulau Singkep. Ini melibatkan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat serta mengikutsertakan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Perencanaan partisipatif yang melibatkan warga lokal dalam pembuatan kebijakan tambang dan pembagian pendapatan adalah langkah penting. Dalam hal ini, edukasi dan pelatihan juga dapat membantu masyarakat lokal memahami dampak dan manfaat dari kegiatan tambang.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa yang mengacu pada agenda SDGs1 (Tanpa Kemiskinan), SDGs9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), SDGs12 (Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab), SDGs15 (kehidupan di darat), dan SDGs17 (kemitraan untuk tujuan), didapati langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah terkait pembangunan ekonomi melalui tambang timah di Pulau singkep agar beraspek pada pembangunan berkelanjutan.

Pertama, untuk mewujudkan SDGs1, pemerintah dapat menggunakan sebagian pendapatan hasil tambang untuk diinvestasikan dalam



pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta layanan kesehatan. Investasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat mampu berkontribusi dalam perekonomian nasional maupun daerah sehingga kemiskinan di Pulau Singkep bisa menurun.

Kedua, untuk mewujudkan SDGs9, pemerintah dapat melakukan modernisasi infrastruktur dan investasi pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pelabuhan, dan penyediaan energi yang handal agar penambangan timah lebih produktif dan efisien. Pemerintah daerah juga dapat berinovasi dalam industri timah dengan mendukung dan mengembangkan teknologi penambangan yang ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan klaster industri sebagai representasi inovasi dengan cara menjadi fasilitator kolaborasi antara perusahaan tambang, pemasok, dan lembaga pendidikan.

Ketiga, untuk mewujudkan SDGs12, pemerintah bersama pihak terkait bisa membuat kesepakatan untuk menggunakan peralatan otomatis, kendali energi yang cermat, serta manajemen data yang cerdas. Pemerintah dapat melakukan diversifikasi produk yang menggandeng masyarakat pulau singkep. strategi selanjutnya yaitu dengan menerapkan teknologi untuk mengelola limbah tambang menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

Keempat, untuk mewujudkan SDGs15, pemerintah dapat melakukan proses pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan terlaksana. Selain itu, pemerintah dapat membuat rencana mengenai rencana lingkungan sebagai upaya mitigasi munculnya permasalahan.

Kelima, untuk mewujudkan SDGs17, membentuk kemitraan agar penambangan timah di Pulau Singkep tetap beraspek pada pembangunan berkelanjutan. Maka pemerintah dapat membentuk kemitraan antara pemerintah dan

swasta, kemitraan internasional, serta kemitraan dengan masyarakat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, R. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Kampoeng Reklamasi PT Timah Dalam Menunjang Pengembangan Sektor Pariwisata Di Desa Riding Panjang Kabupaten Bangka. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(2), 70–76. <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i2.23>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol5(2), hal. 10. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>
- Efrizal, W. (2020). Dampak Ekologis Bangka Belitung Terhadap Keadaan Gizi dan Kesehatan. *Jurnal Ilmu Gizi Indonesia (JIGZI)*, 1(2), 1–9.
- Hadiprashada, D., & Osira, Y. (2022). Kesiapan Masyarakat Menghadapi Bencana Pasca Tambang Timah Ilegal Di Pulau Singkep. 8(1), 239–253.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77–87. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4995](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4995)
- Harahap, I. (2018). Ekonomi pembangunan : pendekatan transdisipliner. *Jurnal Ekonomi*, November, 373.
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). *PEMBANGUNAN EKONOMI&PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: STRATEGI PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM*

- PERSPEKTIF EKONOMI LOKAL*.  
[http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku pembangunan ekonomi contoh fix.pdf](http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku_pembangunan_ekonomi_contoh_fix.pdf)
- Irhamisyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, 38, 45–54.
- Larasati, G. P. (2022). Implementasi Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 244–251.  
<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44063>
- Mukhlis, S., & Setyadiharja, R. (2017). Community Development Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim Di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Memperkuat Provinsi Berbasis Kemaritiman. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 2(1), 37–51.  
<https://doi.org/10.24905/jip.2.1.2017.37-51>
- Muslim, A. Q., Suci, I. G. S., & Pratama, M. R. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Di Jepang, Finlandia, China Dan Indonesia Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(2), 170.  
<https://doi.org/10.25078/aw.v6i2.2827>
- Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2019). Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Sosio Informa*, 5(2), 97–112.  
<https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1728>
- Robuwan, R., & Wirazilmustaan, W. (2022). Dimensi Desentralisasi Analisa Pola Hubungan Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 197–212.  
<https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2713>
- Septianda, F. (2023). EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA ( PMI ) YANG DIDEPORTASI DARI MALAYSIA DI KOTA TANJUNGPINANG. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 15–32.
- Suryanto. (2010). Implikasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Terhadap Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. *Desentralisasi Daerah*, 3(1), 23–40.
- Tahmidaten, L., & Krismanto, W. (2020). Permasalahan Budaya Membaca di Indonesia (Studi Pustaka Tentang Problematika & Solusinya). *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 22–33.  
<https://doi.org/10.24246/j.js.2020.v10.i1.p22-33>
- Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19–38.  
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>
- Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Develompent Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *Bisma*, 11(3), 390.  
<https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479>
- Widiyarini, W., & Latuconsina, S. (2022). Determinan Kinerja Sub Sektor Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2), 222.  
<https://doi.org/10.22146/jkn.74691>